

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 ayat 8 “APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun”.

Salah satu sumber penerimaan APBD adalah dari Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut dengan (PAD). Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Ardiansyah dan Vitalis 2014)

Menurut Darise (2006:143-150), struktur APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli daerah (PAD)

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

- c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Darise (2009:48) mengartikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan. Menurut Mamesah (1995) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok

retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah;

3. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya;

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Undang Undang No.23 Tahun 2014) Dana Alokasi Umum, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah tujuan pemerataan keuangan antar daerah (PP No.55/2005).

Menurut Mardiasmo (2002:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah.

Berdasarkan keputusan presiden tahun anggaran 2013

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Menurut Halim (2001:58) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan IPM yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi dua jenis yaitu DAK Fisik dan Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah.

Menurut Darise (2009:91) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: “Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.” Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk

kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan suhardjo , 2010).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Menurut Arsyad (1999:11), pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Berdasarkan pengertian tersebut,peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, kompo sisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional ,kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007).

Untuk mendukung perkembangan suatu perekonomian daerah tentu saja adanya pengaruh dari pendapatan suatu daerah untuk mengukur kemajuan daerah itu sendiri, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak. Selain itu membangun suatu perkembangan suatu daerah juga dipengaruhi dengan adanya dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK.

2.1.6 Pandemi COVID-19

Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar antar Negara termasuk Indonesia. Sampai dengan bulan agustus 2020, dilaporkan total kasus terkonfirmasi 17.660.523 dengan 680.894 kematian dimana kasus dilaporkan di 216 Negara (WHO, 2020).

Sedangkan di Indonesia kasus terkonfirmasi sebanyak 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi (Kemenkes RI, 2020).

Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemic covid-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukannya social distancing, physical distancing bagi masyarakat Indonesia (Hadiwardoyo, 2020).

Meskipun angka kesembuhan Covid-19 terus meningkat, kemunculan kasus penyebaran Covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih terus memengaruhi laju perekonomian global. Moody's Investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini di bawah pertumbuhan tahun 2019 yang berada di angka 5,02%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 meski dengan disertai sedikit penguatan yaitu tumbuh 4,9% saja (Maya Intan Pratiwi, 2020)

2.2 PENELITIAN TERDAHULU.

Windha Amiga Permanasari (2013) meneliti tentang *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* sampel yang digunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 dengan alasan ketersediaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD positif berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAK dan Belanja Modal berpengaruh positif (secara statistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Aulia Afafun Nisa (2017) meneliti tentang *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* sampel yang digunakan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan bagi hasil pajak terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitian pendapatan asli daerah bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Ni Wayan Ratna Dewi dan Dewa Gede Dharma Suputra (2017) meneliti tentang *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* sampel yang digunakan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana alokasi umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen dan Rosalina A.M. Koleangan (2018) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon* sampel yang digunakan Kota Tomohon Tahun 2005-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh APBD pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1 Tabel Penelitian terdahulu

No.	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan	DAU, DAK, PAD, belanja modal, Pertumbuhan ekonomi	Kuantitatif	DAU dan PAD berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap pertumbuhan

	Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Windha Amiga Permanasari 2013			ekonomi. Sedangkan DAK dan Belanja Modal berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Aulia Afafun Nisa 2017	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi hasil Pajak, Pertumbuhan ekonomi.	Kuantitatif	pendapatan asli daerah bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuha ekonomi. Bagi hasil pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana	Kuantitatif	Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh

	Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ni Wayan Ratna Dewil I Dewa Gede Dharma Suputra2 2017	Alokasi Khusus, Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi		negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana alokasi umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon Olvy Beatriks, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. 2018	pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus pertumbuhan ekonomi.	kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk penelitian saat ini yang sedang dilakukan oleh peneliti, seperti di bawah ini:

2.2.2 Penelitian Lusiana

Penelitian lusiana (2021), berjudul “*Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan saat*

pandemi” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara *pengaruh pendapatan asli daerah, dana aloksi umum dan khusus sebelum dan saat terjadi pandemi* pada *pertumbuhan ekonomi* seluruh daerah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah tahun 2018-2021.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang merupakan pengujian melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan dokumenter.

Tabel. 2.2 Penelitian Sekarang

No	Judul>Nama/Tahun	Variabel	Metode	Hasil yang diinginkan
1.	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan saat pandemi Provinsi Kalimantan Tengah Lusiana (2021)	Pendapatan daerah, Dana alokasi umum dan khusus, pertumbuhan ekonomi	Kuantitatif Deskriptif	Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta mengetahui perubahan perekonomian sebelum dan saat terjadinya pandemi

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

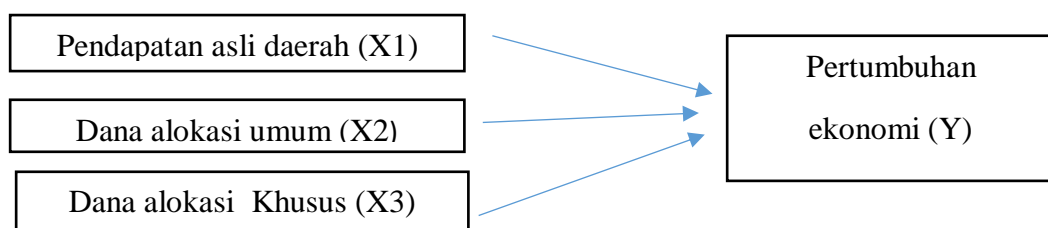
Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

Penelitian (Terdahulu)		Penelitian (Sekarang)	
Windha Amiga Permanasari 2013	Penelitian dilakukan sudah sangat lama. Yang diteliti kota atau kabupaten yang ada diprovinsi periode 2009 – 2011	Lusiana 2021	Penelitian dilakukan dengan data terbaru Yang diteliti yaitu yang diteliti berfokus pada

			kabupaten periode 2018 – 2021
Aulia Afafun Nisa 2017	Variable X3 menggunakan dana bagi hasil pajak	Lusiana 2021	Variable X3 menggunakan dana alokasi khusus
Ni Wayan Ratna Dewa Gede 2017	Pada penelitian ini juga Menghitung pengeluaran daerah Menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif	Lusiana 2021	Pada penelitian ini Fokus pada penerimaan APBD Menggunakan kuantitatif deskriptif
Olvy Beatriks Paulus Kindangen, Rosalina A.M. 2018	- Data yang digunakan sebelum terjadinya pandemi.	Lusiana 2021	- Data yang digunakan sebelum dan saat terjadi pandemi.

2.3 MODEL KONSEPTUAL

Berdasarkan telaah pustaka dan di perkuat dengan penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini akan mengetahui Pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum(X2) dan dana alokasi khusus (X3) apakah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi sebelum dan saat pandemi (Y), menggunakan variabel bebas dan terikat. Adapun kerangka pikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2002: 132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi -potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Berdasarkan penelitian (Permanasari, 2013) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian (Nisa, 2017) pendapatan asli daerah bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian (Dewi, Suputra, 2017) pendapatan asli daerah bertanda negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan penelitian (Olvy et al. 2018) pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak antara lain Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak ialah hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan cara pengalokasian dana yang bersumber dari APBN oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan dimana dalam pengalokasiannya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).

Berdasarkan penelitian (Permanasari, 2013) DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian (Nisa. 2017) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini disebabkan semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian (Dewi, Suputra, 2017) Dana alokasi umum negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian (Olvy et al, 2018) dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi umum meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan *ceteris paribus*. Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud yaitu: (i) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigrasi primer, dan (ii) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Berdasarkan penelitian (Permanasari, 2013) DAK berpengaruh positif (secara statistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalah gunakan / digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.

Berdasarkan penelitian (Dewi, suputra, 2017) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian (Olvy et al, 2018) dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif antar dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi artinya, apabila dana alokasi khusus meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan ceteris paribus. karena Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu daerah semakin tinggi tidak selalu semakin tinggi pula laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi kebutuhan daerah dan yang merupakan prioritas nasional.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi